

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Siklus Akuntansi**

Siklus akuntansi merupakan sebuah proses menyediakan laporan keuangan perusahaan atau lembaga pada suatu periode waktu tertentu. pengolahan data diawali dengan sejak terjadinya transaksi, kemudian pada saat transaksi akan adanya bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi, berdasarkan data atau bukti transaksi yang ada maka akan dilakukan pengimputan proses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan.<sup>1</sup>

Siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam tiga tahap. Pertama, tahap pencatatan yang terdiri dari kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk transaksi dan buku pencatatan, kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku jurnal dan memindahkannya pada buku besar dari jurnal umum berdasarkan kelompok sejenisnya pada akun buku besar. Kedua, tahap pengikhtisaran yang terdiri dari penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, membuat neraca saldo setelah penutupan, membuat ayat jurnal pembalik. Ketiga, tahap pelaporan yang terdiri dari neraca, laporan surplus defisit pada laporan aktivitas, laporan arus kas,

---

<sup>1</sup> Faiz Zamzami dan Nabella Duta, *Akuntansi Pengantar 1*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2016), hal. 9

laporan perubahan aktivitas bersih serta catatan atas laporan keuangan.<sup>2</sup> Siklus akuntansi dapat dimulai dari berikut ini:

#### 1. Bukti transaksi

Bukti transaksi adalah adanya dokumen yang menunjukkan transaksi yang sudah terjadi. Dalam melakukan proses mengenai siklus akuntansi, maka dimulai dengan menganalisis bukti transaksi yang mana transaksi terjadi dengan sebenar-benarnya. Contoh bukti-bukti transaksi yang asli dapat mendukung terjadinya proses transaksi berupa :

- a. Kuitansi adalah sebuah bukti yang menyatakan bahwa lembaga maupun perorangan yang telah menerima sejumlah uang tunai.
- b. Faktur penjualan atau pembelian merupakan bukti dalam sebuah proses transaksi penjualan dalam bentuk kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Faktur terdiri dari dua rangkap di mana faktur yang asli diberikan kepada pihak pembeli sedangkan, salinan faktur akan disimpan pihak penjual. Bagi pihak penjual, faktur tersebut termasuk faktur penjualan sedangkan bagi pihak pembeli merupakan faktur pembelian.
- c. Nota debit adalah bukti perhitungan yang dikirim oleh suatu perusahaan kepada pihak langganannya, bahwa akunnya telah didebitkan dengan jumlah tertentu. Bagi pihak langganannya yang menerima nota debit tersebut akan mencatat pada akun pihak pengirim nota pada sisi yang berlawanan yaitu pada sisi kredit.

---

<sup>2</sup>Abdul Halim dan Syam Kusufi, *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 454

- d. Nota kredit adalah perhitungan yang dikirimkan oleh suatu perusahaan kepada pihak langgananya, bahwa akunnya telah dikreditkan dengan jumlah tertentu. Bagi pihak langganannya yang menerima nota kredit akan mencatat pada akun pihak pengirim nota pada sisi yang berlawanan yaitu pada sisi debit.
- e. Voucher adalah bukti yang dibuat oleh perusahaan atas pengeluaran kas yang tidak berhubungan dengan pembelian. Voucher biasa digunakan untuk transaksi internal maupun eksternal.<sup>3</sup>

## 2. Penjurnalan

Jurnal merupakan catatan peristiwa dari kegiatan transaksi pada suatu lembaga atau perusahaan yang dipakai untuk mencatat setiap transaksi berdasarkan bukti transaksi yang ada, secara kronologis sesuai dengan akun-akun yang terpengaruh dengan jurnal tertentu berdasarkan urutan terjadinya yang harus di debitkan maupun dikreditkan.

Jurnal terdiri dari jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus merupakan jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya dan tergantung aktivitas perusahaan yang bersangkutan. Jurnal khusus terdiri dari atas:

- a. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Pembelian secara tunai tidak dicatat dalam jurnal penjualan melainkan pada jurnal penerimaan kas. Karena tidak adanya transaksi lain yang ada hanya transaksi penjualan secara kredit maka pencatatan dari penjualan ke buku besar seragam dengan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 10

pendebitan pada rekening buku besar dan pengkreditan rekening penjualan.

- b. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Informasi tentang faktur dan pembelian dapat digunakan untuk mengetahui kapan pembelian harus dibayar, pada kolom kredit utang dagang digunakan untuk mencatat jumlah yang dikredit pada masing-masing kreditur.
- c. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang mencatat semua transaksi penerimaan penjualan secara tunai
- d. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang mencatat transaksi pembayaran atau pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan untuk membayar utang dagang atau pembelian barang dagang secara tunai.<sup>4</sup>

Sedangkan jurnal umum merupakan buku harian untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan secara sistematis dan kronologis, pencatatan akan dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan rekening yang diletakkan pada sisi debit dan sisi kredit.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa fungsi mengenai jurnal sebagai berikut:

- a. Fungsi historis merupakan pencatatan setiap bukti transaksi yang dilakukan secara kronologi menurut urutan tanggal terjadinya transaksi.

---

<sup>4</sup> Diyah Santri, *Pengantar Akuntansi 1 Teori Dan Praktik* (Yogyakarta:Aditya Media Publishing,2016), hal. 155

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 34

- b. Fungsi pencatatan merupakan semua transaksi dan kejadian di dalam perusahaan dicatat dalam buku jurnal tanpa ada yang tertinggal.
  - c. Fungsi analisis merupakan pencatatan dalam jurnal yang berasal dari hasil analisis dalam bentuk debit maupun kredit akun-akun dalam jurnal.
  - d. Fungsi informatif merupakan catatan dalam jurnal yang memberikan penjelasan mengenai transaksi yang terjadi dalam kegiatan perusahaan sehari-hari.
3. Posting

Posting adalah proses pemindahan ayat jurnal yang telah dibuat dalam jurnal ke dalam buku besar. Buku besar merupakan kumpulan akun-akun yang saling berhubungan dalam satu kesatuan. Pemindahan jumlah dalam kolom debit jurnal ke sisi debit akun buku besar dan pemindahan jumlah dalam kolom kredit jurnal ke dalam kolom kredit pada buku besar. Kegiatan pemostingan jurnal ke akun buku besar harus sejajar dengan urutan debit dan kredit dari jurnal.<sup>6</sup>

4. Membuat neraca saldo

Setelah dilakukannya posting pada buku besar, maka tahap selanjutnya melakukan pengiktisaran saldo akun. Pengiktisaran ini dimaksud menghitung saldo-saldo setiap akun yang ada dalam buku besar dalam suatu perusahaan. Saldo pada setiap akun akan dikumpulkan dalam suatu daftar yang disebut neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar yang berisi saldo-saldo dari seluruh rekening yang ada dalam buku besar

---

<sup>6</sup> Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2016), hal. 50

pada suatu saat tertentu. Tujuan dari neraca saldo adalah untuk menguji kesamaan antara sisi debit dengan sisi kredit dalam buku besar serta untuk memudahkan penyusunan dalam laporan keuangan.<sup>7</sup>

#### 5. Melakukan Jurnal penyesuaian

Neraca saldo merupakan dasar dari penyusunan laporan keuangan , namun angka-angka yang terdapat di dalamnya belum menunjukkan keadaan keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan. Perusahaan atau lembaga sering kali terjadi di mana pendapatan yang diterima melebihi waktu periode akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan. Beban yang dikeluarkan terkadang tidak bersamaan dengan hasil yang diterima. Pendapatan baru diakui sebagai pendapatan pada saat terealisasi yaitu ketika waktu terjadinya transaksi sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.

Pembebanan biaya dihubungkan dengan pendapatan yang dilaporkan dalam periode dimana pendapatan tersebut diakui. Diperlukannya penyesuaian-penyempaan terhadap pendapatan dan beban melalui jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat agar dapat menyesuaikan saldo akun-akun buku besar ke saldo sesungguhnya dan memisahkan pendapatan dan beban dalam periode-periode yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian merupakan penyesuaian mengenai catatan atau faktur yang sebenarnya pada akhir periode.

Ada beberapa hal-hal yang memerlukan jurnal penyesuaian tersebut adalah:

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 58

- a. Transaksi yang sudah dicatat tetapi perlu dikoreksi agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
  1. Perlengkapan adalah harta yang dimiliki perusahaan untuk masa penggunaan kurang dari satu tahun. Pada saat penggunaan perlengkapan tidak dilakukan pencatatan sehingga nilai dari perlengkapan masih tercantum pada akhir periode sebesar dengan nilai pembelian.
  2. Beban yang dibayar di muka merupakan biaya yang sudah dibayar namun belum dibebankan sebagai biaya pada periode itu, pembayaran dilakukan melebihi satu periode akuntansi sehingga perlu dilakukan jurnal penyesuaian agar dapat diketahui beban yang sebenarnya yang terjadi pada periode tersebut.
  3. Pendapatan yang diterima di muka merupakan kegiatan yang belum terselesaikan tetapi perusahaan sudah menerima pembayaran atas pesanan tersebut, sehingga penerimaan tersebut dinamakan pendapatan yang diterima dimuka.
- b. Suatu transaksi yang sudah terjadi, namun belum dicatat.
  1. Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang sudah terjadi namun hingga pada akhir periode akuntansi masih belum dilakukannya pembayaran.
  2. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang timbul pada akhir periode akuntansi yang terjadi pendapatan tetapi masih belum menerima pembayaran.

3. Penyusutan aktiva tetap merupakan aktiva perusahaan yang digunakan lebih dari satu tahun sehingga mengalami penurunan nilai sampai batas umur ekonomisnya. Sehingga pada neraca dicatat dengan akun akumulasi penyusutan.<sup>8</sup>

#### 6. Neraca lajur

Neraca lajur merupakan kertas kerja yang terdiri dari kolom-kolom yang digunakan untuk memberikan data mengenai saldo setiap rekening, jumlah yang dibutuhkan dan memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur memudahkan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari berbagai kolom neraca saldo, kolom neraca penyesuaian, kolom laba rugi, kolom ekuitas dan kolom neraca.<sup>9</sup>

#### 7. Laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan alat pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh pihak lembaga maupun perusahaan di mana laporan keuangan mencerminkan mengenai informasi atau kondisi dari perusahaan yang mana pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan dapat mengambil suatu keputusan. Laporan keuangan mencakup:

a. Laporan laba rugi merupakan laporan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau rugi dalam satu periode akuntansi. Jika pendapatan lebih besar dari beban maka dapat dikatakan bahwa perusahaan memperoleh laba, sedangkan jika

---

<sup>8</sup> Anggie Hanggara, *Pengantar Akuntansi*, (Surabaya:Jakad Publishing, 2019), hal. 34

<sup>9</sup> Siti Maria, *Pengantar Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang Dan Koperasi*, (Malang: Selaras Media Kreasindo, 2016), hal. 16

pendapatan lebih kecil dari beban maka perusahaan mengalami kerugian. Penyajian laporan laba rugi memuat secara mendetail mengenai semua unsur pendapatan dan beban dalam jangka waktu tertentu. Bentuk dalam laporan laba rugi terdiri dari dua bentuk meliputi:

1. *Single step* atau disebut bentuk langsung, yaitu semua pendapatan dikelompokkan secara tersendiri lalu dijumlahkan pada bagian atas, kemudian mengelompokkan semua beban secara tersendiri dijumlahkan yang terletak di bagian bawah. Jumlah pendapatan dan jumlah beban akan dikurangkan sehingga dihasilkan selisih berupa laba bersih atau rugi bersih.
  2. *Multiple step* atau bertahap, yaitu laporan di mana pendapatan dan beban akan dibedakan ke dalam pendapatan dan beban operasional dengan pendapatan dan beban non operasional. Pendapatan dan beban operasional akan disajikan pertama sedangkan pendapatan dan beban non operasional akan disajikan pada bagian selanjutnya.
- b. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menghasilkan perubahan modal pada suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Penambahan modal bersumber dari investasi dan laba sedangkan pengurangan modal terjadi biasanya disebabkan kerugian dan pengambilan prive.
- c. Neraca atau bisa disebut laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan pada suatu perusahaan mengenai perubahan posisi keuangan berupa asset,

kewajiban, dan ekuitas pada satu periode akuntansi tertentu. Neraca dapat dibuat dalam dua bentuk yaitu:

1. Bentuk T atau skontro adalah bentuk neraca yang terdiri dari dua sisi. Sisi kanan disebut pasiva yang terdiri dari kewajiban dan modal sedangkan pada sisi kiri disebut aktiva yang berisi semua akun aset.
2. Bentuk laporan atau stafel adalah penyajian neraca dibuat berurutan dimulai dari aktiva, kewajiban dan modal yang disusun dari atas ke bawah.

Laporan keuangan tersebut saling berkaitan sehingga tersusun secara sistematis. Laporan keuangan harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang di antaranya relevan, dapat dimengerti, dapat diuji kebenarannya.<sup>10</sup>

#### 8. Jurnal penutup

Jurnal penutup merupakan pencatatan pemindahan saldo akun nominal berupa pendapatan dan beban ke akun modal sehingga seluruh akun nominal harus dinolkan. Saldo akun tersebut dapat dipindahkan melalui iktisar laba rugi dan saldo ikhtisar laba rugi akan dipindahkan ke akun modal. Sehingga yang memerlukan jurnal penutup adalah akun pendapatan, akun beban, akun prive dan akun ikhtisar laba rugi, diakhir periode harus dilakukan jurnal penutup <sup>11</sup>

#### 9. Neraca saldo setelah penutup

---

<sup>10</sup> Faiz Zamzami dan Nabella Duta, *Akuntansi Pengantar 1*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2016), hal. 14

<sup>11</sup> Sohib, *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 153

Neraca saldo setelah penutup merupakan laporan yang digunakan untuk menyusun kembali saldo-saldo akun riil atau akun neraca yang akan disajikan dasar dalam menyusun neraca awal periode berikutnya. Setelah jurnal penyesuaian dan jurnal penutup dipindahkan ke akun-akun buku besar, maka akun-akun nominal seperti pendapatan, beban dan prive akan bersaldo nol. Untuk memastikan keseimbangan akun-akun buku besar dari kelompok akun-akun riil, maka akan disusun neraca saldo setelah penutupan. Pada akhir periode seluruh akun riil atau akun neraca akan disusun kembali untuk penyesuaian dana perubahan atas akun-akun tersebut. Saldo tersebut akan dijadikan dasar penyusunan neraca awal pada periode selanjutnya.<sup>12</sup>

#### 10. Jurnal pembalik

Jurnal pembalik merupakan jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi dan akan membalik jurnal penyesuaian tertentu atau sebelum melakukan transaksi dalam periode akuntansi. Cara membuat jurnal pembalik yaitu dengan mengkredit akun yang di debit dan mendebit akun yang di kredit pada jurnal penyesuaian. Umumnya terdapat empat macam jurnal penyesuaian yang memerlukan jurnal pembalik, yaitu beban yang harus dibayar, beban yang dibayar dimuka bila sebelumnya dicatat sebagai beban, pendapatan yang harus diterima, dan pendapatan yang diterima di muka jika diakui sebagai pendapatan..<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 163

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 166

## B. Lembaga Nirlaba

Menurut Nickels (2009) Lembaga Nirlaba dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk lembaga di mana tujuan pendirian lembaga bukan untuk pencapaian keuntungan.<sup>14</sup> Penjelasan berbeda yang diungkap oleh Kurniasari (2011) yang menyatakan bahwa lembaga nirlaba atau lembaga non profit merupakan sebuah lembaga yang sarannya untuk mendukung suatu isu maupun perihal yang di dalamnya berkaitan dengan perhatian publik untuk tujuan yang tidak komersial.<sup>15</sup> Menurut Nainggolan (2012) lembaga nirlaba adalah salah satu bentuk organisasi yang di mana memiliki tujuan berdirinya untuk kegiatan sosial yang tujuannya tidak memupuk keuntungan atau laba dari kegiatan sosial.<sup>16</sup>

Pernyataan tersebut sama dengan pendapat Surjaweni (2015) yang menyatakan lembaga nirlaba memiliki sumber daya yang digunakan untuk menyelenggarakan aktivitas lembaga berasal dari pihak eksternal maupun para anggota berupa sumbangan yang tidak mengharapkan timbal balik dari lembaga tersebut,<sup>17</sup> dari beberapa pendapat mengenai pemahaman lembaga nirlaba. Maka dapat disimpulkan bahwa lembaga nirlaba merupakan lembaga non profit yang tujuan berdirinya hanya untuk kepentingan sosial saja, para

---

<sup>14</sup> Endra Julianto, et. *Analisis Penerapan PSAK No. 45*, (Jurnal Manajemen, Vol. 9 No. 2, 2017), hal. 57

<sup>15</sup> Desy Rustiyanti, *Penerapan Akuntansi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 (Studi Pada Masjid Al-Baitul Amien Di Njember)*, (Jurnal Akuntansi, Vol. 17 No. 1, 2019), hal. 39

<sup>16</sup> Nur Aziz, *Analisis Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Bagi Yayasan Pendidikan (Studi Kasus Pada Yayasan Pendidikan Bhakti POS Indonesia)*, (Jurnal Competitive, Vol. 11 No. 2, Desember 2016), hal. 2

<sup>17</sup> Aldiansyah dan Linda Lambey, *Penerapan PSAK No. 45 Revisi Tahun 2015 Pada Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kota Kotamobagu*, (Jurnal Accountability, Vol. 6 No. 1, 2017), hal. 92

pihak pemilik maupun pihak pengelola tidak mengharapkan sedikitpun imbalan dalam pelaksanaan kegiatan sosial.

Lembaga sektor publik merupakan lembaga yang kegiatannya sebagai penyedia jasa pelayanan untuk publik.<sup>18</sup> Banyak jenis lembaga sektor publik yang sering dijumpai. Terdapat dua jenis lembaga sektor publik yang berbentuk instansi pemerintahan maupun tidak berbentuk instansi pemerintahan.<sup>19</sup> Lembaga nirlaba memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Tidak adanya kepemilikan dalam lembaga nirlaba seperti hanya lembaga bisnis.
- b. Kekayaan yang terdapat pada lembaga, yang digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional merupakan dana yang bersumber dari pihak luar.
- c. Lembaga menghasilkan barang maupun jasa yang tidak ditujukan untuk memupuk keuntungan yang bersifat pribadi.<sup>20</sup>

Salah satu lembaga sektor publik yang ada adalah yayasan. Badan hukum yang tujuannya untuk mencapai keuntungan melainkan memiliki tujuan yang sifatnya sosial, kemanusiaan, dan keagamaan yang pendiriannya sudah ditetapkan dalam undang-undang yang diatur dalam undang-undang nomor 28

---

<sup>18</sup> Dwi Ayu, et. *Rekonstruksi Laporan Keuangan Lembaga Pendidikan Berdasarkan PSAK 45...*, hal. 2

<sup>19</sup> Deddi Nurdiawab dan Ayuning Tyas, *Akutansi Sector Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hal. 49

<sup>20</sup> Mulia Rahma, *Penerapan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Perspektif PSAK Nomor 45...*, hal. 21

tahun 2004.<sup>21</sup> Kekayaan maupun dana yang ada di dalam yayasan berasal dari pihak eksternal atau pihak luar.<sup>22</sup>

Setiap yayasan pasti memiliki organ yang terdiri dari Pembina, pengurus dan pengawas yang memiliki tugas masing-masing. Pengelolaan dana dan kegiatan yang ada akan dikelola langsung oleh pihak pengelola. Sedangkan yang melakukan laporan keuangan tahunan yaitu pihak pengurus. Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan pada setiap kegiatan yang ada di dalam yayasan.<sup>23</sup>

### **C. Bentuk Pertanggungjawaban Yayasan**

Pola pertanggungjawaban di yayasan bersifat vertical maupun horizontal. Pertanggungjawaban vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal merupakan pertanggungjawaban ke masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban sektor publik tersebut adalah elemen yang sangat penting dari proses akuntabilitas publik.<sup>24</sup>

Setiap organ yang ada di yayasan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama mengenai pengelolaan yayasan. Untuk mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan kecurangan maka adanya pengawasan. Jika terjadi kelalaian yang disebabkan oleh pihak organ maka organ harus melakukan

---

<sup>21</sup> Eldo Fransixco, *Kewajiban Dana Pertanggung Jawaban Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan*, (Lex Et Societatis, Vol 7 No. 9, September,2019), hal. 23

<sup>22</sup> Yumniati Agustin, *Siklus Akuntansi Transparansi Dan Akuntabilitas Atas Penggunaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana BOS Di SDIT X Di Depok Jawa Barat*, (Jurnal Liquidity, Vol. 5 No. 1, Januari-Juni, 2016), hal. 57

<sup>23</sup> Deddi Nurdiawab dan Ayuning Tyas, *Akutansi Sektor Publik...*, hal. 61

<sup>24</sup> Indra Bastian, *Akutansi Yayasan dan Lembaga Publik*, (Jakarta: Erlangga,2007), hal. 4

pertanggungjawaban mengenai kelalaian yang dilakukan, dan yayasan tidak akan terikat mengenai hal-hal tersebut karena sudah diluar wewenang.<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban sepenuhnya berada di tangan pengurus atas setiap kepengurusan baik yang bersifat kepentingan maupun tujuan dari yayasan. Setiap terdapat tindakan kelalaian, kesalahan manajemen maka pengurus wajib bertanggungjawab, karena kepengurusan yang memegang pertanggungjawaban adalah pengurus yang bersifat mutlak.<sup>26</sup>

Sedangkan mengenai hasil kekayaan yang ada di yayasan memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengelolaan kegiatan yayasan. Dikarenakan setiap kegiatan yang terjadi maka akan berkaitan dengan dana yayasan.<sup>27</sup>

#### **D. Standar Akuntansi Lembaga Nirlaba**

Menurut Warren, Reeve dan Fess (2008) Akuntansi diartikan sebagai sistem yang menyediakan informasi laporan untuk pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi sebuah perusahaan.<sup>28</sup>

Kieso, weygandt dan kimmel (2007) akuntansi adalah sistem informasi yang mencatat, mendefinisikan dan mengkomunikasikan mengenai hubungan pada tiap kegiatan-kegiatan ekonomi sebuah perusahaan bagi para pihak yang berkepentingan.<sup>29</sup> Jadi dapat diartikan bahwa akuntansi merupakan sebuah sistem yang dibutuhkan setiap perusahaan untuk memberikan informasi bagi

---

<sup>25</sup> Eldo Fransixco, *Kewajiban Dana Pertanggung Jawaban Organ Yayasan....*, hal. 25

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 26

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 26

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 56

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 57

pengguna kepentingan mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kondisi ekonomi.

Standar akuntansi adalah sebagai pedoman umum dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara wajar yang merupakan pernyataan resmi berkaitan dengan masalah akuntansi tertentu<sup>30</sup>.

Akuntansi keuangan merupakan suatu proses yang tujuannya menyajikan laporan keuangan yang berguna bagi pihak eksternal maupun internal. Pihak yang menyajikan laporan keuangan memerlukan standar akuntansi yang harus digunakann bagi pihak yang menyajikan pelaporan keuangan maupun baik pihak pembaca laporan keuangan.<sup>31</sup>

Dewan standar akuntansi keuangan (DSAK) mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan No. 45 sebagai standar khusus bagi pelaporan keuangan lembaga nirlaba. PSAK No. 45 digunakan saat ini adalah PSAK No. 45 (Revisi 2011). Standar akuntansi keuangan tersebut efektif diterapkan oleh lembaga nirlaba untuk laporan keuangan periode tahun buku.<sup>32</sup>

Sedangkan laporan keuangan merupakan suatu informasi keuangan yang dibuat dan disajikan untuk kepentingan pihak internal maupun eksternal.<sup>33</sup> Menurut Ikatan akuntansi Indonesia (2002) mendefinisikan laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, serta

---

<sup>30</sup> Ahmad Fauzi, *Implementasi PSAK No. 45 Pada Laporan Keuangan...*, hal. 12

<sup>31</sup> Aldiansyah, Linda Lambey, *Penerapan PSAK No. 45 Revisi Tahun 2015 Pada Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kota Kotamobagu...*, hal. 93

<sup>32</sup> Fresisca Wulandari, *Penerapan PSAK 45 Dalam Mengkomunikasikan Aktivitas Pelayanan Masjid Al-Falah Surabaya Terhadap Publik*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 4 No. 1, 2015), hal. 2

<sup>33</sup> Abdul Halim dan Bambang Supomo, *Akuntansi Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hal.139

catatan dan laporan lain yang berisi tentang materi pada bagian laporan keuangan.<sup>34</sup>

Dalam lembaga nirlaba, pelaporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dikarenakan laporan keuangan lembaga akan dapat mencerminkan pengelolaan dana yayasan yang digunakan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagai pengelola dana.<sup>35</sup>

Terkait penerapan standar pelaporan keuangan untuk lembaga nirlaba hanya memberikan pedoman mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sedangkan pengakuan dan penilaian harus mengacu pada standar lain. Hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan mengenai standar yang sesuai dengan pengungkapan dan penilaian. Dengan adanya konvergensi IFRS, maka salah satu PSAK yang sesuai dengan konvergensi IFRS tersebut adalah PSAK 45 (Revisi 2011) yang berkaitan dengan pelaporan keuangan lembaga nirlaba, peraturan tersebut telah disahkan oleh DSAK pada April 2011 dan berjalan efektif pada 1 Januari 2012.<sup>36</sup> Sasaran utama laporan keuangan lembaga nirlaba di sajikan bagi berbagai pihak yang memerlukan laporan keuangan lembaga.<sup>37</sup>

YPAI MI Islamiyah Sidorejo memiliki bagian bendahara yang bertugas dalam menyusun laporan keuangan YPAI MI Islamiyah Sidorejo yang berbentuk kas masuk dan kas keluar serta mencatat setiap kegiatan transaksi yang berkaitan dengan penunjang kegiatan lembaga. YPAI MI Islamiyah

---

<sup>34</sup> Rika Fitri, et. *Peertanggung Jawaban Peraturan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Terhadap Laporan Keuangan...*, hal. 29

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 28

<sup>36</sup> Hastoni, et. *Analisis Penerapan PSAK 45 (Revisi 2011) Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Nirlaba (Studi Pada Yayasan Dharma Setia Kosgoro)*, (Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol. 3 No. 2, 2015), hal. 101

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 102

Sidorejo melakukan transaksi-transaksi yang dapat dikatakan memiliki transparansi dan akuntabilitas karena setiap kegiatan transaksi memiliki bukti transaksi.

Laporan keuangan yang memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, sesuai dengan prinsip akuntansi. Pengakuan merupakan suatu jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefresi dalam laporan keuangan. Pengakuan berhubungan dengan transaksi yang sudah atau belum di jurnal.<sup>38</sup> Pengakuan akuntansi berkaitan dengan dana YPAI MI Islamiyah Sidorejo dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai *cash basic*, penerimaan dana diakui ketika Bendahara YPAI MI Islamiyah Sidorejo sudah menerima dana yang berasal dari dana BOS.

Pengukuran atau Penilaian adalah penentuan jumlah rupiah sebagai unit pengukuran pada suatu objek yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Jumlah rupiah tersebut akan dicatat untuk dijadikan data dasar untuk penyusunan keuangan. Penerimaan dana BOS yang diterima oleh Bendahara YPAI MI Islamiyah Sidorejo diakui sebagai dana lembaga. Pengukuran yang dilakukan oleh pihak lembaga menggunakan satuan uang sesuai dengan jumlah uang yang diterima.

Pengungkapan atau Penyajian merupakan cara penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang

---

<sup>38</sup> Norita Citra, *Studi Penerapan PSAK 45 Yayasan Panti Asuhan Yabappenatim Jember*, (Jurnal Akuntansi, Vol. 12 No. 2, Desember 2014), hal. 70

dinyatakan melalui laporan keuangan utama dan cara penyampaiannya.<sup>39</sup> Penyajian yang dilakukan oleh YPAI MI Islamiyah Sidorejo menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas sehingga dapat diketahui bahwa penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAK 45 mengenai penyusunan dan pelaporan keuangan lembaga nirlaba .

Perlakuan akuntansi yang sesuai dengan prinsip akuntansi berdasarkan PSAK 45 sebagai berikut:

1. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas akan diakui ketika sudah diterima atau dikeluarkan. Kas dan setara kas dicatat sebesar total nilai nominal yang diterima dan disajikan dalam laporan keuangan secara terperinci.

2. Piutang

Piutang akan diakui ketika timbulnya hak penagihan uang atau manfaat ekonomi. Pengukuran piutang disajikan sebesar total nominal yang belum dilunasi sampai tanggal pelaporan tagihan. Piutang akan disajikan sesuai dengan informasi yang sesuai mengenai akun piutang dan disajikan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan.

3. Aset tetap

Aset tetap diakui ketika saat masa manfaat ekonomi masa depan yang didapatkan dan nilainya terukur. Aset tetap diukur berdasarkan nilai biaya perolehan serta aset tetap harus disajikan ke dalam laporan keuangan secara terpisah dengan jenis-jenis aset tetap.

---

<sup>39</sup> Norita Citra, *Studi Penerapan PSAK 45 Yayasan Panti Asuhan Yabappenatim Jember...*, hal. 71

#### 4. Bangunan

Bangunan dicatat berdasar harga taksiran aset yang dilakukan penilaian ulang gedung, harga perolehan gedung akan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, gedung disajikan sebagai aset tetap atas aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan.

#### 5. Tanah

Tanah dicatat berdasar harga taksiran aset. Tanah tidak dilakukan akumulasi penyusutan, tanah disajikan sebagai aset tetap pada laporan posisi keuangan.

#### 6. Peralatan

Peralatan dicatat berdasarkan dengan taksiran harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Peralatan diakui sebagai aset tetap.

#### 7. Kewajiban

Kewajiban dicatat sebagai beban tetapi belum membayar sehingga dicatat sebagai kewajiban. Kewajiban yang harus dibayar dilakukan dengan jurnal penyesuaian setiap akhir periode. Beban yang masih harus dibayar disajikan sebagai kewajiban lancar pada laporan posisi keuangan.<sup>40</sup>

#### 8. Liabilitas Jangka Pendek

Utang jangka pendek akan diakui ketika dikeluarkannya dana dari kas guna pembayaran tertentu. Utang akan dicantumkan sesuai dengan total nilai utang yang dimiliki. Utang akan disajikan kedalam laporan keuangan neraca dengan pos kewajiban jangka pendek dan diakhir periode jika masih

---

<sup>40</sup> Fresisca Wulandari, *Penerapan PSAK Dalam Mengkomunikasikan Aktivitas...*, hal. 7

terdapat sisa utang maka harus dilakukan pencatatan sesuai dengan jumlah yang masih harus dibayarkan.

#### 9. Liabilitas Jangka Panjang

Utang jangka panjang diakui sebesar jumlah total yang jatuh tempo setelah bulan tanggal neraca. Utang jangka panjang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

#### 10. Sumbangan

Sumbangan diakui sebagai pada saat janji diterima sebesar nilai atau kas yang diterima jika dipastikan keterjadiannya dan diukur dengan handal. Pendapatan terikat diakui pada saat adanya hak atas pendapatan tersebut.

#### 11. Beban-beban

Beban-beban akan diakui ketika beban-beban sudah terjadi sesuai dengan jumlah nominal beban yang timbul dan diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.<sup>41</sup>

### **E. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45**

Penerbitan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 45 merupakan standar yang digunakan untuk penyusunan dan pelaporan keuangan dari lembaga nirlaba. Standar tersebut diterbitkan agar laporan keuangan lembaga menjadi lebih relevan, mudah dipahami dan memiliki daya banding yang tinggi.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Oktia Lestari, *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK 45 Pada Yayasan Barunawati Biru Surabaya*, (Jurnal Ilmiah, Vol. 1 No. 4), hal. 8

<sup>42</sup> Nefi Siti, et. *Penerapan Psak No. 45 Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas...*, hal. 3

Pelaporan keuangan lembaga nirlaba yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan pengelolaan dalam laporan keuangan entitas nirlaba terbagi menjadi empat hal, berikut merupakan contoh bentuk penyajian laporan keuangan yang berpedoman pada PSAK 45 sebagai berikut:

- a. Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan lembaga karena mencakup pengukuran posisi keuangan, berupa aset, liabilitas dan aset neto.<sup>43</sup> Laporan posisi keuangan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan antar likuiditas dan aset, maupun fleksibilitas keuangan.<sup>44</sup>

**Tabel 2.1**  
**Laporan Posisi Keuangan**

<b>Entitas Nirlaba</b> <b>Laporan Posisi Keuangan</b> <b>Per 30 Juni 20XX</b>	
<b>ASET</b>	
Aset Lancar	
Kas Dan Setara Kas	XXX
Piutang Siswa	XXX
Aset Tidak Lancar	
Aset Tetap	XXX
Akumulasi Penyusutan	<u>(XXX)</u>
<b>Jumlah Aset</b>	<b><u>XXX</u></b>
<b>LIABILITAS</b>	
Liabilitas Jangka Pendek	

<sup>43</sup> Dwi Martini, et. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hal. 138

<sup>44</sup> Poly Endrayanto, *Penerapan PSAK Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Bagi Yayasan Pendidikan*, (Jurnal Riset Akuntansi Vol. 9 No. 2 2019), hal. 5

Liabilitas Jangka Panjang	-
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<u>-</u>
	-
<b>ASET NETO</b>	
Tidak Terikat	
Terikat Temporer	XXX
Terikat Permanen	XXX
<b>Jumlah Aset Neto</b>	<u>-</u>
	<u>XXX</u>
<b>Jumlah Liabilitas dan Aset Neto</b>	
	<b>XXX</b>

Sumber: Poly Endrayanto, 2019, hal. 96

- b. Laporan Aktivitas merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai transisi pada aset neto pada satu periode tertentu. Laporan aktivitas menyajikan perubahan aset neto secara tidak terikat, terikat temporer maupun terikat permanen dalam satu periode.<sup>45</sup>

**Tabel 2.2**  
**Laporan Aktivitas**

<b>Entitas Nirlaba Laporan Aktivitas Per 30 Juni 20XX</b>	
<b>Pendapatan Aset Neto Tidak Terikat</b>	
Dana BOS	XXX
Sumbangan donatur	<u>XXX</u>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<u>XXX</u>
<b>Beban</b>	
Biaya Gaji	XXX
Biaya Pemeliharaan	XXX

<sup>45</sup> Nur Aziz, *Analisi Penerapan PSAK No. 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Bagi Yayasan Pendidikan Studi Kasus Pada Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia...*, hal. 7

Biaya Honor Eskul	XXX
Beban Penggandaan Soal	XXX
Beban Pengembangan UKS	XXX
Beban Listrik	XXX
Beban Upah	XXX
Beban Transport	XXX
Beban Konsumsi	XXX
Beban Administrasi Dan Umum	XXX
Beban Pengembangan Murid	XXX
Beban Pengembangan Guru	XXX
Beban Alat Kebersihan	XXX
Beban Perbaikan Dan Pemeliharaan	XXX
Beban Penyusutan Gedung	XXX
Beban Penyusutan Peralatan	XXX
Beban Lain-Lain	XXX
<b>Jumlah Beban</b>	<b>XXX</b>
<b>Kenaikan/Penurunan Aset Neto Tidak Terikat</b>	<b>XXX</b>
<b>Perubahan Aset Neto Terikat Permanenn</b>	<b>XXX</b>
<b>Kenaika/Penurunan Aset Neto Terikat Permanen</b>	<b>XXX</b>
<b>JUMLAH PERUBAHAN ASET NETO</b>	<b>XXX</b>
<b>TOTAL ASET NETO AWAL TAHUN</b>	<b>XXX</b>
<b>TOTAL ASET NETO AKHIR TAHUN</b>	<b>XXX</b>

Sumber : Dedy Nurdiawan, Ayuningtyas Hertianti, 2010, hal. 132

- c. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas disajikan pada suatu periode tertentu.<sup>46</sup>

**Tabel 2.3**  
**Laporan Arus Kas**

<b>Entitas Nirlaba</b> <b>Laporan Arus Kas</b> <b>Per 30 Juni 20XX</b>	
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi :</b>	
Kas Dari Dana BOS	XXX
Kas Dari Sumbangan	XXX
Penerimaan Lain-Lain	XXX
	<b>XXX</b>
<b>Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasional</b>	<b>XXX</b>
<b>Aktivitas Investasi</b>	<b>XXX</b>

<sup>46</sup> Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*, (Jakarta:Salemba Empat, 2014), hal. 233

<b>Aktivitas Pendanaan</b>	<u>XXX</u>
<b>Kenaikan Neto Kas Dan Setara Kas</b>	<u>XXX</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<u>XXX</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<u>XXX</u>

Sumber : *Deddy Nurdiawan, Ayuningtyas Hertianti, 2010, hal. 133*

- d. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan keuangan yang memberikan gambaran mengenai penilaian yang komprehensif dari setiap kondisi finansial pada suatu lembaga.<sup>47</sup>

**Tabel 2.4**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**

<b>Entitas Nirlaba</b> <b>Catatan Atas Laporan Keuangan</b> <b>Per 30 Juni 20XX</b>	
<b>A. UMUM</b>	
<b>B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>	
1. Dasar Akuntansi	
2. Periode Akuntansi	
<b>C. KAS DAN SETARA KAS</b>	
<b>D. ASET TETAP</b>	
<b>Harga Perolehan</b>	
Bangunan	XXX
Tanah	XXX
Peralatan	<u>XXX</u>
<b>Jumlah</b>	<u>XXX</u>
<b>Akumulasi penyusutan</b>	
Bangunan	XXX
Tanah	XXX
Peralatan	<u>XXX</u>
<b>Jumlah</b>	<u>XXX</u>
<b>E. PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN</b>	
1. Pendapatan	XXX
2. Beban	XXX
<b>F. ASET NETO</b>	
1. Aset Neto Tidak Terikat	XXX
2. Aset Neto Terikat Permanen	XXX

Sumber : *Dwi Ayu dkk, 2019, hal. 99*

<sup>47</sup> Nefi Siti, et. *Penerapan PSAK No. 45 Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas...*, hal. 5

## F. Penelitian Terhadahu

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode penelitian</b>	<b>Hasil penelitian</b>
1	Rika Fitri Ramayani (2019)	Pertanggungjawaban Peraturan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Terhadap Laporan Keuangan Program Kerja Badan Musyawarah Keluarga Minang Kabau	Kualitatif	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa BMKM mencatat segala kegiatan yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran kas keuangan, namun BMKM masih mencari sistem pengelolaan dan penataan keuangan yang dapat mencerminkan pertanggung jawaban yang sesuai.
2	Mulia Rahma (2019)	Analisis Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Perspektif PSAK Nomor 45 Untuk Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Yayasan Sekolah Dasar Rhema Indonesia	Kualitatif	Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa yayasan sekolah dasar rhema Indonesia masih melakukan pelaporan keuangan yang belum menerapkan PSAK nomor 45, dikarenakan dalam laporan keuangannya hanya aset lancar saja yang dicantumkan sedangkan aset tidak lancar tidak dicantumkan.
3	Nurlila Dan Nia Rahma Kurnianda (2020)	Analisis Perancangan Sistem Penerimaan Donasi Dan Laporan Pertanggungjawaban Pada Yayasan Yatim Piatu Aisyiyah	Kualitatif	Dalam hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana donasi di dalam yayasan masih dilakukan secara manual sehingga transparansi dan pertanggung jawaban yayasan masih sangat terbatas.
4	Eldo Fransixco	Kewajiban Tanggung Jawab	Kualitatif	Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yaysan memiliki anggota

	Dumanauw (2019)	Organisasi Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan		kepengurusan yang berkewajiban melakukan pengawasan dan membuat pelaporan keuangan atas dana yang di kelolanya.
5	Yumniati Agustina (2016)	Siklus Akuntansi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Atas Penggunaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bos Di SDIT X Di Depok, Jawa Barat	Kualitatif	Dalam hasil analisis penelitian menunjukkan pencatatan dana BOS yang dilakukan oleh pihak SDIT X masih dilakukan secara manual di dalam buku kas umum.

## G. Kerangka Konseptual

Penelitian ini mengetahui pertanggungjawaban pelaporan keuangan Yayasan Pendidikan Agama Islam MI Islamiyah Sidorejo yang berdasarkan pada penyusunan dan pelaporan keuangan yang berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 seperti: peraturan ketentuan yang terkait dengan laporan keuangan lembaga nirlaba yang tercantum pada UU No. 18 Tahun 2004 pasal 52 ayat 5 tentang Yayasan dinyatakan bahwa laporan keuangan yang tergolong lembaga nirlaba harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Dev Anand, *Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Yayasan Berdasar PSAK 45*, (Jurnal Kajian Akuntansi, Vol. 2 No. 2, 2018), hal. 161

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

